Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak antara Apresiasi dan Pelanggaran Kode Etik¹

Oleh

SUPARTO

Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru

supartodandy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang terlambat sekitar 10 bulan dari putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim berpotensi melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yaitu prinsip Independensi dan prinsip Kecakapan dan Keseksamaan. Ke depan perlu diatur jangka waktu maksimal kapan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi itu harus dilaksanakan sejak diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan ketentuan tersebut dapat dimasukkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Kata Kunci : Hakim Konstitusi, Kode Etik

Constitutional Court Ruling on Simultaneous Election:

Between Appreciation and Code Violation

The reading of the ruling of the Constitutional Court No.14 / PUU-XI / 2013 concerning judicial review on Law No. 42 of 2008 on General Election of President and Vice President which delayed for about 10 months from the decision of the Consultative Meeting of Judges has potential to violate the code of ethics and code of conduct of Constitutional Court Judges namely the principles of Independence and the principle of Proficiency and Thoroughness. In the future, a maximum period of time should be set on when the ruling of Constitutional Court's should be read from the time it is decided in the Consultative Meeting of Judge, while the provision itself could be included in the Constitutional Court rule on guidelines for the Judicial Review Procedures.

Keywords: Constitutional Court Judges, Code of Ethics

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dimulai pada tahun 2004 dan untuk pertama kalinya pemilihan langsung tersebut dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla melalui dua putaran. Pada tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk tahun 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.²

Dalam perjalanannya sejak pemilihan umum presiden dilakukan secara langsung, pemilihan umum presiden dan wakil presiden selalu didahului oleh pemilu legislatif (Pemilu DPR, DPD, dan DPRD), artinya pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah dengan pemilu legislatif.³ Berdasarkan hasil pemilu legislatif inilah kemudian partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas yang telah ditentukan oleh undang-undang, mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden untuk bertarung dalam pemilu presiden dan wakil presiden.⁴ Salah satu alasan kenapa pemilu legislatif dilakukan terlebih dahulu dibandingkan dengan pemilu presiden dan wakil presiden adalah agar partai-partai politik peserta pemilu mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi atau koalisi dengan partai-partai politik yang lain dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Pemilihan umum yang dilakukan secara terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dianggap banyak dampak negatifnya, antara lain dari segi biaya,

² www.kpu.go.id

³ Lihat Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁴ Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konpress MKRI, hlm. 48.

waktu dan tenaga dalam menyelenggarakan pemilu tersebut. Selain itu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara terpisah (Pemilu legislatif dilakukan terlebih dahulu), secara politis merupakan kehendak dari partai-partai besar agar dapat mengusulkan calon-calonnya dan untuk menekan atau menyingkirkan partai-partai kecil dengan membuat ambang batas minimal untuk pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.⁵

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, koalisi masyarakat sipil untuk pemilu serentak yang diwakili oleh Effendy Ghazali mengajukan *Judicial Review* Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal yang dilakukan pengujian adalah Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan pada permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Effendy Ghazali dan menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan catatan putusan tersebut berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan tersebut, menjadikan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Putusan ini memunculkan berbagai macam respon dari berbagai kalangan dalam masyarakat baik yang memberi apresiasi maupun yang menilai adanya kejangalan. Hal yang menjadi sorotan antara lain adalah terjadinya keterlambatan dalam

⁵ A. Mukhtie Fadjar, 2013, *Pemilu, Perselisihan Pemilu dan Demokrasi*, Malang, Setara Press, Malang, hlm. 91

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

pembacaan putusan yang memakan waktu kurang lebih 10 bulan. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU No. 42 Tahun 2008 telah diputuskan pada tanggal 26 Maret 2013 sedangkan pembacaan putusannya dilakukan pada tanggal 23 Januari 2014. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari beberapa pihak khususnya para kandidat calon Presiden bahwa Mahkamah Konstitusi dianggap sengaja mengulur-ngulur waktu dengan tujuan untuk menjegal kandidat calon Presiden tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
Mengapa terjadi keterlambatan pembacaan putusan perkara No.14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ?

B. PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu serentak 2019 ditanggapi beragam oleh berbagai pihak khususnya sejumlah parpol peserta pemilu. Putusan tersebut dianggap menyimpan sejumlah kejanggalan. Beragam kejanggalan muncul, diantaranya adalah terlambatnya pembacaan putusan hingga dugaan Mahkamah Konstitusi melanggar UU-nya sendiri. Pasca pembacaan putusan pada Kamis tanggal 23 Januari 2015, belum ada keterangan resmi dari Mahkamah Konstitusi menjawab kejanggalan yang ada itu. Namun Mahfud MD menyatakan putusan ini tak memiliki dampak berarti terhadap pelaksanaan pemilu 2014. Kecuali dampak politis yang merasakan langsung putusan ini di masa lima tahun yang akan datang. “Tidak ada dampak apa-apa untuk 2014, hanya dampak politis. Ada parpol yang suka dan tidak suka,” kata Mahfud MD.⁷

Sebagai ketua majelis dalam uji materi UU Pilpres ini, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak langsung membacakan hasil putusan UU Pilpres pada 26 Maret 2013 lalu hal ini disebabkan karena beliau keburu pensiun pada 1 April 2013. Hingga Mahkamah Konstitusi berganti ketua sebanyak dua kali, putusan ini tidak juga dibacakan. Barulah pada tanggal 24 Januari 2014, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva sebagai ketua majelis dalam sidang uji materi perkara bernomor 14/PUU-XI/2013 itu membacakan putusan yang diketok pendahulunya. Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Shaleh menyatakan, ada kejanggalan, apa latar belakangnya sehingga putusan bulan Maret 2013 diucapkan bulan Januari 2014. Apa latar belakangnya mengapa putusan bisa diperam begitu lama.⁸ Tidak ada satupun Hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Adapun Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ketika diminta penjelasannya juga

⁷ [www.detik.com/putusan/Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak](http://www.detik.com/putusan/Mahkamah_Konstitusi_Tentang_Pemilu_Serentak). Diakses tanggal 30 Mei 2015.

⁸ [www.detik.com/putusan/Pemilu Serentak](http://www.detik.com/putusan/Pemilu_Serentak). Diakses pada tanggal 30 Juni 2015.

tidak memberikan pernyataan apapun. Sebab dalam perkara ini, guru besar ilmu perundang-undangan Universitas Indonesia (UI) itu memilih menolak permohonan.

Pihak pemohon yaitu Effendi Gazali, yang mengajukan uji materi, menerima putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu serentak tersebut. Mahkamah memutuskan pemilu serentak dilaksanakan pada Pemilu 2019. Namun, terkait *presidential threshold*, itu diserahkan kepada pembuat undang-undang. Akan tetapi, Effendi menilai ada kejanggalan dalam proses pengambilan keputusan. Ia mengatakan, pada tanggal 19 Maret 2013, saat memasukkan kesimpulan dalam surat permohonan tercantum dengan jelas permintaan kepada Mahkamah Konstitusi agar segera memutus permohonan itu. Effendi menyebutkan, di halaman 10 tertulis bahwa pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya sebelum 9 April 2014 sehingga tidak mengganggu persiapan pemilu. Namun putusan belum juga dibuat. Tim kuasa hukum Koalisi kemudian melayangkan surat kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Mei 2013. Isi Surat tersebut menanyakan nasib permohonannya. Surat kemudian dijawab tanggal 30 Mei 2013. Dalam jawabannya Panitera Mahkamah Konstitusi Sidahuruk menyatakan bahwa sesuai arahan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu (Akil Mochtar) bahwa saat ini permohonan *a quo* masih dalam proses, masih dalam rapat hakim yang bersifat tertutup. Surat jawaban dari Mahkamah Konstitusi itu kemudian diketahui bertentangan dengan fakta yang diungkap oleh Mahfud MD. Sebelum pensiun, Mahfud MD menyebutkan telah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada tanggal 26 Maret 2013. Dalam rapat itu, Mahfud MD menyatakan RPH sudah menetapkan putusan terhadap gugatan Effendi dan kawan-kawan.⁹ Para hakim lainnya berjanji kepada Mahfud akan membacakan putusan pada bulan April 2013. Ini adalah janji yang lalu dilanggar sehingga terlihat bahwa memang ada niat untuk menunda pembacaan putusan ini, ia menduga, hakim

⁹ [www.detik.com/putusan/Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak](http://www.detik.com/putusan/Mahkamah_Konstitusi_Tentang_Pemilu_Serentak). Diakses tanggal 30 Mei 2015

Mahkamah Konstitusi sengaja mencari momentum yang tepat untuk mengeluarkan putusannya sehingga tak bisa dilaksanakan pada pemilu 2014.¹⁰ Mahkamah Konstitusi berdalih persiapan pemilu yang sempit menjadi alasan bahwa pemilu serentak dilaksanakan tahun 2019.

Terkait dengan lambatnya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi yang sampai 10 bulan belum pernah terjadi sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dan yang menjadi tanda tanya besar dari masyarakat adalah kenapa hal itu sampai terjadi dan yang lebih mengherankan lagi adalah ternyata tidak ada satupun hakim Mahkamah Konstitusi atau pihak Mahkamah Konstitusi yang dapat menjelaskan secara tegas kepada masyarakat kenapa begitu lama putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan. Jadi sangat wajar kalau banyak pihak yang mencurigai adanya maksud-maksud tertentu dibalik lambatnya pembacaan putusan tersebut apalagi yang dilakukan pengujian ini adalah undang-undang politik yang sangat strategis yaitu undang-undang tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga ada anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi sengaja mengulur-ngulur waktu agar pemilu serentak tersebut tidak dapat dilaksanakan pada pemilu 2014 dengan maksud untuk menjegal calon-calon Presiden tertentu. Karena dengan dilakukannya pemilu serentak antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka logikanya partai politik atau gabungan partai politik yang lolos pemilu otomatis dapat mengajukan calon Presidennya walaupun sebetulnya *presidential threshold* atau syarat ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tidak dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap hal tersebut sebagai *open legal policy*. Salah satu calon Presiden yang merasa dirugikan dengan lambatnya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pemilu serentak tidak dapat dilaksanakan pada pemilu 2014 adalah Yusril Ihza Mahendra.

¹⁰ www.hukumonline.com /Pengujian UU Pilpres, Pemilu Serentak. Diakses tanggal 30 Mei 2015.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan, sehingga apabila putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini akan diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat itu telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat dan dapat mengalami kekacauan serta menimbulkan ketidakpastian hukum.¹¹

Penulis setuju atau sependapat dengan alasan hakim Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014. Pada saat itu, memang tahapan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah berjalan, dengan demikian argumentasi hakim Mahkamah Konstitusi menjadi benar adanya. Tetapi seandainya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut segera dibacakan setelah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2013 maka alasan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi tidak tepat, karena pada bulan Maret 2013 tahapan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 belum dimulai.

Menurut penulis, kalau pada saat itu hakim Mahkamah Konstitusi punya kekhawatiran terhadap dampak atau akibat yang bakal muncul terhadap adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, khususnya yang terkait dengan teknis pelaksanaan pemilu serentak dan peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, Mahkamah Konstitusi dapat berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi penyelenggara pemilihan umum dan DPR serta pemerintah sebagai institusi pembentuk undang-undang. Kalau ternyata semua institusi yang terkait tersebut sanggup dan siap melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2014 maka Mahkamah Konstitusi dapat segera membacakan putusan

¹¹ Lihat Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

pengujian Undang-Undang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut atau pemilu serentak dilaksanakan tahun 2014. Demikian juga sebaliknya seandainya berdasarkan hasil konsultasi ternyata Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR dan pemerintah tidak sanggup dan tidak siap, Mahkamah Konstitusi juga segera harus membacakan putusannya dan memutuskan bahwa pemilu serentak baru dapat dilaksanakan pada pemilu tahun 2019. Cara ini menurut penulis dapat menghilangkan adanya kecurigaan dari beberapa pihak bahwa terlambatnya hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan yang memakan waktu sampai 10 bulan sengaja dilakukan untuk menjegal dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Hal senada juga disampaikan Saldi Isra, keterlambatan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terabaikannya prinsip penyelesaian perkara secara cepat, tetapi sekaligus menjadi bukti kaburnya logika urgensi pengajuan uji materi karena adanya momentum proses bernegara yang amat penting yaitu pemilu. Kejadian ini bertolak belakang misalnya dengan penyelesaian permohonan uji materi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008. Terkait dengan pemakaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam penggunaan hak pilih yang diajukan menjelang pemilu Presiden Tahun 2009. Karena dinilai sangat urgen, Mahkamah Konstitusi memutusnya hanya dalam sehari, padahal pengujian pemilu serentak sama pentingnya dengan penggunaan hak pilih memakai KTP.¹²

Pendapat yang sama disampaikan oleh Refly Harun, ia berpandangan dan menduga bahwa pembacaan putusan yang terlambat yang menyebabkan pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2019. Sangat mungkin pemilu serentak dilakukan pada tahun 2014. Jika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada akhir Maret atau awal April 2013. Oleh karena itu kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

¹² Saldi Isra, *Pemilu Serentak (Bukan) Putusan Yang Hambar*, www.saldiisra.web.id. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

dapat membawanya ke Majelis Etik Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian mereka bisa memperoleh klarifikasi alasan keterlambatan pembacaan putusan tersebut.¹³

Demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie ia menyatakan bahwa, alasan Mahkamah Konstitusi penundaan atau terlambatnya pembacaan putusan pemilu serentak karena banyaknya perkara alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Jika persoalannya adalah manajemen, maka itu bisa diselesaikan kepemimpinan di internal Mahkamah Konstitusi. Sebab perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi per tahunnya tidak mencapai ribuan, artinya 9 hakim Mahkamah Konstitusi semestinya dapat menyelesaikan hal itu. Kalau dibandingkan dengan negara lain, 9 hakim Agung Amerika Serikat setiap tahun menghadapi 10 ribu perkara, 18 hakim Konstitusi Jerman setiap tahun menghadapi 20 ribu perkara.¹⁴

Menurut penulis, terlambatnya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi ini berpotensi melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama). Utamanya adalah prinsip *Independensi* butir (6) yang menyebutkan bahwa hakim Konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah.¹⁵ Karena dengan adanya kasus ini ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi independen karena dianggap sengaja menjegal dan menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan cara memperlambat pembacaan putusan. Adanya anggapan seperti ini jelas

¹³ www.djunaedird.wordpress.com/Putusan *Pemilu Serentak Dinilai "Dijual"*, Majelis Etik Mahkamah Konstitusi Diminta Diusut. Diakses tanggal 15 Agustus 2015.

¹⁴ www.kompas.web.id/Kontroversi *Pembacaan Putusan, Jimly; Mahkamah Konstitusi Agar Tak Terulang*. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

¹⁵ Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi No.09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Prinsip Independensi butir 6

mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi Mahkamah Konstitusi.

Selain Prinsip Independensi, menurut penulis hakim Mahkamah Konstitusi juga berpotensi melanggar Prinsip *Kecakapan dan Keseksamaan* yang mana dalam prinsip tersebut disebutkan bahwa Keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim Konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan. Kemudian dipertegas dalam butir (5) bahwa hakim Konstitusi harus menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik dan tepat waktu termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak.¹⁶ Dengan adanya kasus tersebut atau keterlambatan dalam pembacaan putusan, hakim Mahkamah Konstitusi patut diduga telah menunda-nunda pengambilan keputusan. Walaupun sebetulnya yang ditunda adalah pembacaan putusan, namun menurut penulis antara pengambilan keputusan dan pengucapan putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seorang hakim yang telah membuat keputusan harus segera diucapkan atau dibacakan, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai perangkat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) yang disebut dengan Dewan Etik. Dewan Etik beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi

¹⁶ Lihat pada Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan butir 5 Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.

- b. 1 (satu) orang akademisi
- c. 1 (satu) orang tokoh masyarakat

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Etik tidak hanya bersifat pasif artinya hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat bahwa telah diduga terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim konstitusi, tetapi Dewan Etik juga dapat bertindak aktif dengan memproses adanya dugaan hakim konstitusi telah melakukan pelanggaran berdasarkan informasi yang berasal dari pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik serta dari masyarakat luas.

Penulis berpendapat bahwa terkait dengan terlambatnya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah menjadi pemberitaan yang luas, sudah selayaknya Dewan Etik untuk pro aktif memproses adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Menurut penulis, kedepan perlu dibuat regulasi atau pengaturan terkait dengan jangka waktu maksimal kapan pembacaan putusan harus dilakukan setelah adanya pengambilan keputusan oleh hakim konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim. Klausul ini dapat diatur dalam bentuk peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, karena dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada saat ini (peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang) masalah tenggat waktu tersebut belum diatur.¹⁷

¹⁷ Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

C. KESIMPULAN

Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang terlambat sekitar 10 bulan dari putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim berpotensi melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yaitu prinsip Independensi dan prinsip Kecakapan dan Keseksamaan. Ke depan perlu diatur jangka waktu maksimal kapan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi itu harus dilaksanakan sejak diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) agar ada kepastian hukum dan pihak pihak yang terkait dengan putusan tersebut tidak ada yang dirugikan. Ketentuan tersebut dapat dimasukkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fadjar, A. Muktie, 2013, *Pemilu, Perselisihan Pemilu dan Demokrasi*, Malang : Setara Press.

Gaffar, Janedjri M., *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta : Konpress Mahkamah Konstitusi RI.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU – XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

C. Internet

www.kpu.go.id

www.saldiisra.web.id/Menggadaikan *Suara Rakyat*. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

www.detik.com/putusan/Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak. Diakses tanggal 30 Mei 2015.

www.detik.com/putusan/Pemilu Serentak. Diakses pada tanggal 30 Juni 2015.

www.hukumonline.com /Pengujian UU Pilpres, Pemilu Serentak. Diakses tanggal 30 Mei 2015.

www.djunaedird.wordpress.com/Putusan *Pemilu Serentak Dinilai “Dijual”*, Majelis Etik Mahkamah Konstitusi Diminta Diusut. Diakses tanggal 15 Agustus 2015.

www.kompas.web.id/Kontroversi *Pembacaan Putusan, Jimly; Mahkamah Konstitusi Agar Tak Terulang*. Diakses tanggal 15 Agustus 2015